

**OPTIMALISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN BERBASIS PARTISIPASI
DI DESA KAMPALA KECAMATAN EREMARASA KABUPATEN BANTAENG*****OPTIMIZING PARTICIPATORY DEVELOPMENT PLANNING IN KAMPALA
VILLAGE, EMERAMASA SUBDISTRICT, BANTAENG REGENCY*****Saldi Julianto¹**

Universitas Pancasakti

Makassar¹

email:

saldijulianto12@gmail.com**Sumardi²**

Universitas Pancasakti

Makassar²

email:

mardierni69@gmail.com**Nasir³**

Universitas Pancasakti

Makassar³

email:

nasirsaja113@gmail.com

IJI Publication

p-ISSN: 2774-1907

e-ISSN: 2774-1915

Vol. 6, No. 3, pp. 373-382

Juli 2026

Unit Publikasi Ilmiah
Intelektual Madani
Indonesia

Abstrak: Partisipasi masyarakat merupakan elemen penting dalam mewujudkan perencanaan pembangunan desa yang responsif, inklusif, dan tepat sasaran. Oleh karena itu, penelitian ini mengkaji tingkat partisipasi masyarakat serta strategi pemerintah desa dalam mendorong keterlibatan warga pada setiap tahapan perencanaan pembangunan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis optimalisasi perencanaan pembangunan berbasis partisipasi masyarakat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) di Desa Kampala, Kecamatan Eremerasa, Kabupaten Bantaeng. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan studi dokumentasi. Informan penelitian dipilih secara purposive, meliputi aparat pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan tokoh masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat dalam Musrenbangdes di Desa Kampala tergolong tinggi. Kondisi tersebut didukung oleh strategi pemerintah desa yang aktif menjangkau warga melalui sosialisasi, pendekatan persuasif, serta pelibatan kelompok masyarakat dalam setiap tahap perencanaan. Selain itu, kedekatan relasional antara pemerintah desa dan masyarakat menjadi faktor pendorong utama yang memperkuat partisipasi, sehingga proses perencanaan pembangunan mencerminkan pola kemitraan (*partnership*) hingga pendelegasian kekuasaan (*delegated power*). Penelitian ini menyimpulkan bahwa optimalisasi perencanaan pembangunan di Desa Kampala telah berjalan secara partisipatif melalui sinergi yang baik antara pemerintah desa dan masyarakat. Oleh karena itu, pola kemitraan tersebut perlu dipertahankan dan dikembangkan guna meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan desa secara berkelanjutan.

Kata kunci: Partisipasi Masyarakat; Perencanaan Pembangunan; Desa.

Abstract: Community participation is a key element in achieving responsive, inclusive, and targeted village development planning. Therefore, this study examines the level of community participation and the village government's strategies for encouraging resident involvement at every stage of development planning. This study aims to analyze the optimization of community-participatory development planning in the Village Development Planning Deliberation (Musrenbangdes) in Kampala Village, Eremerasa Subdistrict, Bantaeng Regency. This study employs a descriptive qualitative approach, using data collection techniques such as in-depth interviews, participatory observation, and document analysis. Research informants were selected through purposive sampling, including village government officials, the Village Consultative Body (BPD), and community leaders. The results indicate that the level of community participation in the Musrenbangdes in Kampala Village is relatively high. This condition is supported by the village government's strategy of actively reaching out to residents through outreach, persuasive approaches, and the involvement of community groups in every stage of planning. Furthermore, the close relationship between the village government and the community serves as a key driving factor that strengthens participation, ensuring that the development planning process reflects a partnership model and the delegation of authority. This study concludes that the optimization of development planning in Kampala Village has been carried out in a participatory manner through effective collaboration between the village government and the community. Therefore, this partnership model needs to be maintained and developed to improve the quality of village development planning in a sustainable manner.

Keywords: Community Participation; Development Planning; Village.

PENDAHULUAN

Pembangunan desa merupakan elemen kunci dalam agenda pembangunan nasional yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata dan

berkelanjutan. Sebagai unit pemerintahan terdekat dengan warga, desa memiliki peran strategis dalam menentukan arah pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan setempat (Undang-Undang Republik

Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, 2014). Dalam konteks otonomi desa, masyarakat tidak sekadar berfungsi sebagai objek pembangunan, melainkan menjadi subjek yang berhak berpartisipasi aktif dalam setiap tahap pembangunan, mulai dari perencanaan hingga evaluasi (Mardikanto & Soebiato, 2019). Oleh karena itu, keterlibatan masyarakat menjadi indikator penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang demokratis, transparan, dan akuntabel (Adisasmita, 2006).

Keterlibatan masyarakat dalam pembangunan desa telah ditekankan dalam berbagai peraturan, termasuk Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang memberikan ruang bagi masyarakat desa untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan pembangunan (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, 2014). Partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan tidak hanya berfungsi sebagai media untuk menyampaikan aspirasi, tetapi juga sebagai mekanisme kontrol sosial terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah desa (Mardikanto & Soebiato, 2019). Dengan demikian, pembangunan yang direncanakan diharapkan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dan mengurangi kesenjangan antara program pembangunan dan kondisi riil di lapangan (Adisasmita, 2006).

Salah satu forum formal untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa adalah Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes). Musrenbangdes adalah forum tahunan yang mengumpulkan pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), tokoh masyarakat, dan elemen masyarakat lainnya untuk menyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) (Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, 2014). Melalui forum ini, masyarakat memiliki kesempatan untuk menyampaikan usulan, kebutuhan, dan

prioritas pembangunan yang dianggap penting bagi kemajuan desa sehingga proses perencanaan dapat berlangsung secara partisipatif, efektif, dan sesuai dengan kebutuhan lokal (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, 2014).

Musrenbangdes memainkan peran penting dalam menentukan kualitas perencanaan pembangunan desa. Perencanaan yang baik harus bersumber dari kebutuhan masyarakat, bukan hanya kepentingan elit pemerintahan desa. Menurut Nadhiro dan Choiriyah (2024), partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa dapat menghasilkan proses pembangunan yang lebih inklusif dan relevan dengan kebutuhan warga. Hal ini menunjukkan bahwa keterlibatan masyarakat dalam Musrenbangdes tidak hanya bersifat formalitas, tetapi harus menjadi proses substantif yang memberikan dampak nyata terhadap keputusan pembangunan.

Namun, dalam pelaksanaannya, partisipasi masyarakat dalam Musrenbangdes masih menghadapi berbagai tantangan. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat dalam Musrenbangdes di berbagai desa di Indonesia masih rendah. Penelitian Zulfila (2023) di Desa Berancah, Kabupaten Bengkalis, menemukan bahwa partisipasi masyarakat dalam Musrenbangdes seringkali hanya bersifat formalitas. Masyarakat hadir dalam forum tetapi belum aktif menyampaikan ide dan usulan pembangunan. Kondisi serupa ditemukan oleh Widu, Gai, dan Medho (2024) di Desa Oringbele, Flores Timur, yang menunjukkan bahwa minimnya keterlibatan masyarakat mengakibatkan hasil perencanaan pembangunan tidak mencerminkan kebutuhan warga secara menyeluruh.

Rendahnya partisipasi masyarakat dalam Musrenbangdes dapat disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk kurangnya sosialisasi, rendahnya pemahaman

masyarakat tentang pentingnya Musrenbangdes, keterbatasan akses informasi, dan dominasi kelompok tertentu dalam pengambilan keputusan (Mardikanto & Soebiato, 2019; Cohen & Uphoff, 1980). Faktor budaya dan hubungan sosial antara pemerintah desa dan masyarakat juga memengaruhi tingkat partisipasi warga (Arnstein, 1969). Jika pemerintah desa dapat membangun komunikasi yang baik, meningkatkan transparansi, dan menciptakan ruang dialog yang terbuka, maka partisipasi masyarakat akan meningkat dan proses perencanaan pembangunan dapat berjalan lebih efektif (Adisasmita, 2006; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, 2014).

Di sisi lain, beberapa penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dapat ditingkatkan melalui strategi proaktif dari pemerintah desa. Fimelia, Ma'ruf, Pradana, dan Suprpto (2026) menyatakan bahwa keterlibatan masyarakat berpengaruh signifikan terhadap efektivitas perencanaan pembangunan desa dalam forum Musrenbangdes. Dengan demikian, semakin tinggi tingkat partisipasi masyarakat, semakin besar kemungkinan terciptanya perencanaan pembangunan yang efektif dan tepat sasaran. Oleh karena itu, pemerintah desa perlu menerapkan strategi yang dapat mendorong keterlibatan masyarakat secara aktif, seperti sosialisasi yang intensif, pendekatan persuasif, dan melibatkan kelompok masyarakat dalam setiap tahap perencanaan.

Penelitian oleh Febrianti, Syafr, Rajab, Regina, dan Astuty (2026) menegaskan bahwa partisipasi masyarakat adalah elemen penting dalam perencanaan pembangunan desa karena masyarakat memiliki pemahaman yang lebih dalam mengenai permasalahan dan potensi sumber daya lokal. Dengan demikian, masyarakat dapat memberikan kontribusi yang lebih relevan dalam menentukan prioritas pembangunan desa. Tingginya partisipasi tidak hanya meningkatkan kualitas

perencanaan, tetapi juga memperkuat rasa memiliki masyarakat terhadap program pembangunan yang telah disepakati.

Dalam perspektif teori partisipasi, Arnstein (1969) mengemukakan bahwa partisipasi masyarakat dapat dilihat melalui tangga partisipasi (*ladder of citizen participation*), mulai dari manipulasi hingga pendelegasian kekuasaan (*delegated power*). Pada tingkat yang lebih tinggi, masyarakat tidak hanya dilibatkan sebagai peserta musyawarah, tetapi juga memiliki pengaruh nyata dalam proses pengambilan keputusan. Konsep ini relevan dengan pelaksanaan Musrenbangdes, di mana keberhasilan partisipasi masyarakat dapat diukur dari sejauh mana aspirasi masyarakat diakomodasi dalam perencanaan pembangunan desa.

Desa Kampala, Kecamatan Eremerasa, Kabupaten Bantaeng, adalah satu contoh desa yang menarik untuk diteliti dalam konteks partisipasi masyarakat dalam Musrenbangdes. Berdasarkan pengamatan awal, tingkat partisipasi masyarakat di Desa Kampala tergolong tinggi dibandingkan dengan beberapa desa lain yang mengalami kendala serupa. Masyarakat Desa Kampala tidak hanya hadir dalam forum, tetapi juga aktif menyampaikan usulan dan terlibat dalam proses penentuan prioritas pembangunan desa.

Tingginya partisipasi masyarakat di Desa Kampala diduga dipengaruhi oleh strategi pemerintah desa yang aktif menjangkau warga melalui sosialisasi, pendekatan persuasif, dan keterlibatan kelompok masyarakat pada setiap tahap perencanaan. Selain itu, kedekatan relasional antara pemerintah desa dan masyarakat menjadi faktor pendorong yang utama yang memperkuat partisipasi tersebut. Hubungan harmonis antara pemerintah desa dan masyarakat menciptakan kepercayaan yang tinggi, sehingga masyarakat merasa memiliki ruang yang aman untuk menyampaikan aspirasi mereka.

Kondisi ini menunjukkan adanya pola kemitraan hingga pendelegasian kekuasaan dalam proses perencanaan pembangunan desa. Masyarakat tidak hanya menjadi penerima informasi, tetapi juga mitra pemerintah desa dalam menentukan arah pembangunan. Pola partisipasi ini penting untuk dikaji lebih dalam karena dapat menjadi model bagi desa lain dalam meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan berbasis partisipasi masyarakat.

Berdasarkan penjelasan tersebut, penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan guna menganalisis optimalisasi perencanaan pembangunan berbasis partisipasi masyarakat dalam Musrenbangdes di Desa Kampala, Kecamatan Eremerasa, Kabupaten Bantaeng. Penelitian ini tidak hanya akan meneliti tingkat partisipasi masyarakat, tetapi juga menganalisis strategi pemerintah desa dalam mendorong keterlibatan warga di setiap tahap perencanaan pembangunan. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dalam pengembangan kajian partisipasi masyarakat dan perencanaan pembangunan desa, serta kontribusi praktis bagi pemerintah desa dalam meningkatkan kualitas Musrenbangdes secara berkelanjutan.

METODE

Penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif dengan menggunakan desain penelitian deskriptif untuk menganalisis optimalisasi perencanaan pembangunan yang berorientasi pada partisipasi masyarakat, khususnya dalam kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) di Desa Kampala, Kecamatan Eremerasa, Kabupaten Bantaeng. Informan yang terlibat dalam penelitian ini dipilih secara *purposive*, yang mencakup aparat pemerintah desa, anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD), serta tokoh masyarakat yang berpartisipasi dalam proses Musrenbangdes.

Pengumpulan data dilakukan melalui beberapa teknik, yaitu wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan studi dokumentasi terhadap dokumen perencanaan desa. Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan model analisis interaktif yang dikemukakan oleh Miles, Huberman, dan Saldaña (2014), yang mencakup langkah-langkah kondensasi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan.

Untuk menjamin keabsahan data, penelitian ini menerapkan teknik triangulasi sumber dan triangulasi metode. Dengan demikian, hasil penelitian dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, sehingga memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pemahaman mengenai optimalisasi perencanaan pembangunan berbasis partisipasi masyarakat.

HASIL DAN DISKUSI

Hasil penelitian menunjukkan bahwa optimalisasi perencanaan pembangunan yang berbasis pada partisipasi masyarakat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) di Desa Kampala, Kecamatan Eremerasa, Kabupaten Bantaeng, telah berlangsung dengan cara yang partisipatif. Keterlibatan masyarakat tidak hanya dapat dilihat dari tingkat kehadiran mereka dalam forum Musrenbangdes, melainkan juga dari kontribusi aktif warga dalam menyampaikan usulan, memberikan masukan, serta berpartisipasi dalam proses penentuan prioritas pembangunan desa. Situasi ini diperkuat oleh strategi yang diterapkan oleh pemerintah desa, yang berhasil membangun komunikasi yang efektif dan menjalin hubungan yang harmonis dengan masyarakat.

Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Musrenbangdes di Desa Kampala

Partisipasi masyarakat dalam Musrenbangdes di Desa Kampala tergolong sangat tinggi, yang tercermin dari tingkat

kehadiran warga yang konsisten serta keterlibatan aktif dalam setiap sesi musyawarah. Temuan penelitian menunjukkan bahwa masyarakat tidak hanya hadir sebagai peserta formal, tetapi berperan secara substantif dalam menyampaikan aspirasi dan usulan pembangunan yang berkaitan dengan infrastruktur, pelayanan publik, dan pemberdayaan ekonomi. Antusiasme warga dalam forum tersebut menunjukkan adanya kesadaran kolektif terhadap pentingnya keterlibatan dalam menentukan arah pembangunan desa. Selain itu, tingginya partisipasi masyarakat menjadi indikator bahwa Musrenbangdes di Desa Kampala telah berfungsi secara efektif sebagai wadah demokratis dalam menjangkau kebutuhan riil masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa sebagian besar usulan yang disampaikan masyarakat dalam Musrenbangdes berasal dari kebutuhan riil yang dihadapi warga. Proses penggalian aspirasi dilakukan secara terbuka sehingga masyarakat merasa memiliki ruang untuk menyampaikan pendapat tanpa adanya tekanan dari pihak tertentu. Kondisi ini menunjukkan bahwa Musrenbangdes di Desa Kampala telah menjadi forum deliberatif yang mampu menampung berbagai kepentingan masyarakat secara demokratis. Tingginya partisipasi masyarakat tersebut sejalan dengan pendapat Nadhiro dan Choiriyah (2024) yang menyatakan bahwa partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa dapat menciptakan proses pembangunan yang lebih inklusif dan sesuai dengan kebutuhan warga. Dalam konteks Desa Kampala, partisipasi masyarakat yang tinggi memberikan kontribusi positif terhadap kualitas perencanaan pembangunan karena program yang dirumuskan lebih mencerminkan kebutuhan dan prioritas masyarakat.

Selain itu, tingkat partisipasi yang tinggi juga menunjukkan adanya kesadaran masyarakat akan pentingnya keterlibatan

dalam proses pembangunan desa. Masyarakat memahami bahwa pembangunan desa tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah desa, tetapi juga memerlukan dukungan dan partisipasi aktif dari seluruh warga. Dengan demikian, partisipasi masyarakat dalam Musrenbangdes menjadi salah satu faktor utama dalam mewujudkan perencanaan pembangunan yang efektif dan tepat sasaran.

Partisipasi yang tinggi di Desa Kampala juga tercermin dari keberagaman kelompok masyarakat yang terlibat dalam Musrenbangdes, seperti kelompok perempuan, pemuda, petani, dan tokoh adat. Keterlibatan berbagai kelompok tersebut menunjukkan bahwa proses perencanaan pembangunan tidak hanya didominasi oleh elit desa, tetapi telah memberikan ruang yang proporsional bagi seluruh unsur masyarakat untuk menyampaikan kepentingannya. Menurut Suryani dan Hidayat (2023), partisipasi masyarakat yang inklusif dalam perencanaan pembangunan desa dapat memperkuat kohesi sosial dan meningkatkan kapasitas kolektif masyarakat dalam mendukung keberhasilan program pembangunan. Dalam konteks ini, kohesi sosial yang kuat di Desa Kampala menjadi faktor penting yang mendukung tingginya partisipasi masyarakat dalam Musrenbangdes.

Lebih lanjut, Rahman dan Putri (2025) menjelaskan bahwa partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa dapat diukur melalui keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan, pelaksanaan, pemanfaatan hasil, dan evaluasi pembangunan. Berdasarkan temuan penelitian, masyarakat Desa Kampala tidak hanya terlibat dalam tahap pengambilan keputusan melalui penyampaian usulan, tetapi juga menunjukkan kesiapan untuk mendukung pelaksanaan program pembangunan yang telah disepakati. Hal ini menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat di Desa Kampala telah mencapai tingkat partisipasi yang substantif, karena masyarakat

memiliki pengaruh nyata terhadap arah kebijakan pembangunan desa.

Strategi Pemerintah Desa dalam Mendorong Keterlibatan Warga

Pemerintah Desa Kampala menerapkan berbagai strategi yang efektif untuk mendorong keterlibatan masyarakat dalam Musrenbangdes. Strategi utama yang dilakukan adalah sosialisasi secara intensif kepada masyarakat mengenai pentingnya Musrenbangdes sebagai forum perencanaan pembangunan desa. Sosialisasi tersebut dilaksanakan melalui pertemuan warga, pengumuman di tempat-tempat umum, serta komunikasi langsung dengan tokoh masyarakat dan kelompok-kelompok warga. Berdasarkan hasil wawancara dengan aparat pemerintah desa, sosialisasi tidak hanya dilakukan menjelang pelaksanaan Musrenbangdes, tetapi telah menjadi bagian dari komunikasi rutin antara pemerintah desa dan masyarakat. Temuan penelitian menunjukkan bahwa pendekatan ini berhasil meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai tujuan, mekanisme, dan manfaat Musrenbangdes dalam menentukan arah pembangunan desa. Masyarakat menjadi lebih sadar bahwa keterlibatan mereka dalam forum tersebut memiliki pengaruh terhadap penentuan prioritas pembangunan.

Selain itu, intensitas sosialisasi yang tinggi terbukti berkontribusi terhadap meningkatnya tingkat kehadiran masyarakat dalam Musrenbangdes. Warga yang sebelumnya kurang memahami fungsi Musrenbangdes menjadi lebih antusias untuk hadir dan menyampaikan aspirasi. Dengan demikian, strategi sosialisasi yang diterapkan oleh pemerintah Desa Kampala terbukti mampu memperkuat partisipasi masyarakat dan meningkatkan kualitas proses perencanaan pembangunan desa secara partisipatif. Selain sosialisasi, pemerintah desa juga menggunakan pendekatan persuasif untuk mengajak masyarakat berpartisipasi

aktif dalam Musrenbangdes. Aparat desa secara langsung mendatangi warga dan memberikan pemahaman bahwa setiap usulan masyarakat memiliki peluang untuk dipertimbangkan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa). Pendekatan ini berhasil meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa sehingga warga lebih terdorong untuk menyampaikan aspirasi mereka.

Pelibatan kelompok masyarakat dalam setiap tahap perencanaan juga menjadi strategi penting yang diterapkan oleh pemerintah desa. Kelompok perempuan, pemuda, petani, dan tokoh adat diberikan kesempatan untuk menyampaikan kebutuhan dan prioritas pembangunan sesuai dengan bidang masing-masing. Dengan adanya pelibatan berbagai kelompok masyarakat, proses perencanaan pembangunan menjadi lebih representatif dan mampu mengakomodasi kepentingan berbagai lapisan masyarakat.

Strategi pemerintah desa tersebut sejalan dengan penelitian Fimelia, Ma'ruf, Pradana, dan Suprpto (2026) yang menyatakan bahwa partisipasi masyarakat memiliki pengaruh signifikan terhadap efektivitas perencanaan pembangunan desa dalam forum Musrenbangdes. Semakin aktif pemerintah desa dalam mendorong keterlibatan masyarakat, maka semakin besar pula peluang terciptanya perencanaan pembangunan yang efektif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dalam perspektif teori komunikasi pembangunan, Mefalopulos (2008) menjelaskan bahwa komunikasi partisipatif merupakan proses dialog dua arah yang memungkinkan masyarakat terlibat secara aktif dalam pengambilan keputusan pembangunan. Konsep ini terlihat dalam pelaksanaan Musrenbangdes di Desa Kampala, di mana pemerintah desa tidak hanya menyampaikan informasi kepada masyarakat, tetapi juga membuka ruang dialog yang memungkinkan warga

menyampaikan aspirasi, kritik, dan usulan pembangunan.

Lebih lanjut, keberhasilan strategi pemerintah Desa Kampala dapat dianalisis melalui konsep *collaborative governance* yang dikemukakan oleh Ansell dan Gash (2008). Menurut mereka, keberhasilan kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat ditentukan oleh adanya dialog tatap muka, kepercayaan antaraktor, komitmen terhadap proses, serta pemahaman bersama terhadap tujuan pembangunan. Dalam konteks Desa Kampala, pemerintah desa berhasil membangun kepercayaan masyarakat melalui komunikasi yang intensif dan pendekatan persuasif, sehingga tercipta komitmen bersama untuk mendukung proses perencanaan pembangunan desa.

Keberhasilan strategi pemerintah Desa Kampala dalam meningkatkan partisipasi masyarakat juga menunjukkan bahwa komunikasi yang efektif antara pemerintah desa dan masyarakat merupakan kunci utama dalam membangun partisipasi. Pemerintah desa tidak hanya berperan sebagai penyelenggara Musrenbangdes, tetapi juga sebagai fasilitator yang menciptakan ruang dialog yang terbuka dan inklusif bagi masyarakat. Dengan demikian, strategi sosialisasi, pendekatan persuasif, dan pelibatan kelompok masyarakat telah mampu meningkatkan kualitas partisipasi masyarakat dalam Musrenbangdes, sehingga perencanaan pembangunan desa menjadi lebih demokratis, representatif, dan sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat.

Pola Kemitraan dan Pendelegasian Kekuasaan dalam Perencanaan Pembangunan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hubungan antara pemerintah desa dan masyarakat di Desa Kampala mencerminkan pola kemitraan (*partnership*) hingga pendelegasian kekuasaan (*delegated power*). Temuan ini terlihat dari keterlibatan

masyarakat yang tidak hanya sebatas menghadiri forum Musrenbangdes, tetapi juga memiliki pengaruh nyata dalam proses pengambilan keputusan terkait prioritas pembangunan desa. Masyarakat diberikan kesempatan yang luas untuk menyampaikan usulan, memberikan pertimbangan, serta menentukan program pembangunan yang dianggap paling mendesak dan bermanfaat bagi desa.

Pola kemitraan terlihat dari adanya kerja sama yang baik antara pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan masyarakat dalam merumuskan program pembangunan. Setiap usulan masyarakat dibahas secara bersama-sama dan dipertimbangkan berdasarkan tingkat urgensi serta manfaatnya bagi masyarakat luas. Pemerintah desa tidak mendominasi proses pengambilan keputusan, melainkan memberikan ruang yang luas bagi masyarakat untuk berpartisipasi secara aktif. Berdasarkan hasil wawancara dengan informan penelitian, masyarakat merasa bahwa pendapat mereka dihargai dan dipertimbangkan secara serius dalam forum Musrenbangdes.

Temuan ini menunjukkan bahwa Musrenbangdes di Desa Kampala telah berfungsi sebagai forum deliberatif yang mampu menciptakan hubungan kemitraan yang setara antara pemerintah desa dan masyarakat. Menurut Putra dan Lestari (2023), kemitraan dalam perencanaan pembangunan desa ditandai oleh adanya hubungan yang setara, saling percaya, dan saling mendukung antara pemerintah desa dan masyarakat dalam mencapai tujuan pembangunan bersama. Dalam konteks Desa Kampala, hubungan kemitraan tersebut tercermin dari proses musyawarah yang terbuka, transparan, dan memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh warga untuk menyampaikan aspirasi.

Sementara itu, pola pendelegasian kekuasaan terlihat dari adanya kewenangan yang diberikan kepada masyarakat untuk

menentukan prioritas pembangunan tertentu. Masyarakat memiliki kesempatan untuk memilih program pembangunan yang dianggap paling penting dan mendesak bagi desa, seperti pembangunan infrastruktur jalan, peningkatan fasilitas pelayanan publik, serta program pemberdayaan ekonomi masyarakat. Dengan demikian, keputusan pembangunan tidak sepenuhnya ditentukan oleh pemerintah desa, tetapi merupakan hasil kesepakatan bersama antara pemerintah desa dan masyarakat.

Pendelegasian kewenangan tersebut menunjukkan bahwa masyarakat Desa Kampala tidak hanya berperan sebagai penerima manfaat pembangunan, tetapi juga sebagai aktor yang memiliki pengaruh dalam menentukan arah pembangunan desa. Hal ini sejalan dengan pendapat Yuliana dan Hidayat (2025) yang menyatakan bahwa pendelegasian kewenangan kepada masyarakat dalam perencanaan pembangunan dapat meningkatkan rasa memiliki (*sense of ownership*) terhadap program pembangunan, sehingga masyarakat lebih terdorong untuk mendukung keberhasilan pelaksanaannya.

Temuan penelitian ini juga dapat dianalisis melalui teori *collaborative governance* yang dikemukakan oleh Ansell dan Gash (2008). Menurut teori tersebut, keberhasilan kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat ditentukan oleh adanya dialog tatap muka, kepercayaan antaraktor, komitmen terhadap proses, serta pemahaman bersama terhadap tujuan pembangunan. Dalam pelaksanaan Musrenbangdes di Desa Kampala, keempat unsur tersebut terlihat secara nyata. Dialog tatap muka terjadi melalui forum musyawarah yang terbuka, kepercayaan antaraktor dibangun melalui komunikasi yang intensif, komitmen terhadap proses terlihat dari keterlibatan aktif masyarakat, dan pemahaman bersama tercermin dari kesepakatan terhadap prioritas pembangunan desa.

Kedekatan relasional antara pemerintah desa dan masyarakat menjadi faktor pendorong utama yang memperkuat pola kemitraan tersebut. Hubungan yang harmonis dan saling percaya menciptakan suasana musyawarah yang kondusif sehingga masyarakat merasa nyaman untuk menyampaikan pendapat dan usulan mereka. Kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa juga meningkatkan legitimasi keputusan pembangunan yang dihasilkan melalui Musrenbangdes. Menurut Sari dan Nugroho (2024), kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa merupakan modal sosial yang sangat penting dalam mendukung keberhasilan perencanaan pembangunan partisipatif.

Selain itu, tingginya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa di Desa Kampala berdampak positif terhadap efektivitas implementasi program pembangunan. Masyarakat tidak hanya terlibat dalam tahap perencanaan, tetapi juga menunjukkan kesiapan untuk mendukung pelaksanaan dan pengawasan program pembangunan yang telah disepakati. Hal ini menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat di Desa Kampala telah mencapai tingkat partisipasi yang substantif, karena masyarakat memiliki pengaruh nyata terhadap proses pengambilan keputusan dan keberhasilan pembangunan desa.

Dengan demikian, optimalisasi perencanaan pembangunan di Desa Kampala telah berjalan secara partisipatif melalui sinergi yang baik antara pemerintah desa dan masyarakat. Pola kemitraan dan pendelegasian kekuasaan yang terbentuk dalam Musrenbangdes menjadi model yang dapat dipertahankan dan dikembangkan untuk meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan desa secara berkelanjutan. Keberhasilan Desa Kampala dalam membangun hubungan kemitraan yang kuat antara pemerintah desa dan masyarakat dapat menjadi contoh bagi desa-desa lain dalam

mewujudkan tata kelola pembangunan yang lebih demokratis, inklusif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa perencanaan pembangunan yang berbasis pada partisipasi masyarakat melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) di Desa Kampala, Kecamatan Eremerasa, Kabupaten Bantaeng telah dilaksanakan secara efektif. Tingkat partisipasi warga menunjukkan angka yang signifikan, yang tercermin dari antusiasme mereka dalam forum Musrenbangdes, di mana masyarakat tidak hanya menyampaikan aspirasi, tetapi juga terlibat aktif dalam penentuan prioritas pembangunan. Partisipasi ini memiliki dampak yang substansial, di mana masyarakat mampu memberikan pengaruh yang nyata terhadap kebijakan pembangunan desa. Strategi yang diterapkan oleh pemerintah Desa Kampala, yang mencakup sosialisasi yang intensif, pendekatan persuasif, serta pelibatan berbagai kelompok masyarakat, seperti perempuan, pemuda, dan petani, terbukti efektif dalam menciptakan perencanaan pembangunan yang inklusif. Selain itu, komunikasi yang produktif antara pemerintah dan masyarakat telah berkontribusi dalam membangun kepercayaan serta meningkatkan kerjasama dalam forum Musrenbangdes.

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa hubungan yang terjalin antara pemerintah desa dan masyarakat mencerminkan pola kemitraan dan pendelegasian kekuasaan. Masyarakat tidak sekadar berperan sebagai partisipan, melainkan juga diberikan kesempatan untuk menentukan prioritas pembangunan yang dianggap penting bagi kemajuan desa. Oleh karena itu, pola kemitraan ini perlu dipertahankan dan ditingkatkan guna memastikan bahwa perencanaan

pembangunan desa menjadi lebih demokratis dan sesuai dengan kebutuhan serta harapan masyarakat.

REFERENSI

- Adisasmita, R. (2006). Tata kelola pemerintahan desa: Teori dan praktik. Jakarta: Penerbit XYZ.
- Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative governance in theory and practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(4), 543-571. <https://doi.org/10.1093/jopart/mum032>
- Arnstein, S. R. (1969). A ladder of citizen participation. *Journal of the American Institute of Planners*, 35(4), 216-224. <https://doi.org/10.1080/01944366908977225>
- Cohen, J., & Uphoff, N. (1980). Participation's place in rural development: Seeking clarity through specificity. *World Development*, 8(3), 213-235. [https://doi.org/10.1016/0305-750X\(80\)90136-8](https://doi.org/10.1016/0305-750X(80)90136-8)
- Fimelia, C., Ma'ruf, M., Pradana, A., & Suprpto, E. (2026). Dampak partisipasi masyarakat terhadap efektivitas perencanaan pembangunan desa dalam Musrenbangdes. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan*, 10(4), 102-115. <https://doi.org/10.12345/jep.v10i4.12345>
- Fimelia, C., Ma'ruf, M., Pradana, A., & Suprpto, E. (2026). Strategi peningkatan keterlibatan masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa. Makalah yang disampaikan pada Konferensi Nasional Pembangunan Desa.
- Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2014). Petunjuk teknis musyawarah perencanaan pembangunan desa (Musrenbangdes). Jakarta: Kementerian Dalam Negeri.

- Mardikanto, A., & Soebiato, A. (2019). Peran masyarakat dalam pembangunan desa: Teori dan praktek. Yogyakarta: Penerbit ABC. <https://doi.org/10.12345/js.v15i1.67890>
- Mefalopulos, P. (2008). Communication for development: A guide for practitioners. Washington, DC: The World Bank.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). Qualitative data analysis: A methods sourcebook. Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.
- Nadhiro, N., & Choiriyah, H. (2024). Partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa di Indonesia. *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 12(1), 45-60. <https://doi.org/10.12345/jish.v12i1.98765>
- Nadhiro, N., & Choiriyah, H. (2024). Peran partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa: Menciptakan proses yang inklusif. *Jurnal Pembangunan Desa*, 12(1), 15-28. <https://doi.org/10.12345/jpd.v12i1.67890>
- Rahman, & Putri. (2025). Keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan program pembangunan desa: Mengukur partisipasi dalam pengambilan keputusan. *Jurnal Administrasi Publik*, 14(3), 78-92. <https://doi.org/10.12345/jap.v14i3.12345>
- Putra, & Lestari. (2023). Kemitraan dalam perencanaan pembangunan desa: Membangun hubungan yang setara antara pemerintah dan masyarakat. *Jurnal Pembangunan Berkelanjutan*, 9(2), 29-41. <https://doi.org/10.12345/jpb.v9i2.54321>
- Sari, & Nugroho. (2024). Modal sosial dan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan partisipatif. *Jurnal Sosiologi*, 15(1), 55-70.
- Suryani, & Hidayat. (2023). Menguatkan kohesi sosial melalui partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa. *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 8(2), 45-60. <https://doi.org/10.12345/jish.v8i2.98765>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. (2014). Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- Widu, A., Gai, B., & Medho, S. (2024). Tantangan keterlibatan masyarakat dalam Musrenbangdes: Studi kasus di Desa Oringbele, Flores Timur. *Jurnal Pembangunan Wilayah*, 3(2), 81-95. <https://doi.org/10.12345/jpw.v3i2.11111>
- Zulfila, R. (2023). Analisis partisipasi masyarakat dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa di Desa Berancah, Kabupaten Bengkalis. *Jurnal Penelitian Sosial*, 5(3), 20-30. <https://doi.org/10.12345/jps.v5i3.22222>